



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(L P P D)
TAHUN 2021**



**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIKKA
TA. 2021**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rampungnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPP) Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.

*Dalam program dan kegiatan tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kab.Sikka melaksanakan 2 (dua) urusan pilihan yaitu Perdagangan dan urusan pilihan Perindustrian serta 1 (satu) urusan Wajib Pelayanan dasar koperasi usaha kecil dan menengah. Dalam urusan pilihan perdagangan melaksanakan 5(Lima) program, 6 (enam) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi belanja langsung Rp.2.016.918.800. Untuk urusan perindustrian terdapat 1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) Sub Kegiatan dengan alokasi belanja langsung Rp.558.656.300; sedangkan untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar koperasi terdapat 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan, 20 (dua Puluh) Sub Kegiatan dengan alokasi belanja langsung Rp.641.307.400. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka memiliki **alokasi belanja langsung Rp. 2.679.429.329** dan **belanja tidak langsung sejumlah Rp. 3.8569.342.841** sehingga jumlah **total keseluruhan alokasi anggaran** dalam Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. **6.248.722.170***

Pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2021 tidaklah terlepas dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga tahapan demi tahapan program dan kegiatan dapat terlaksana meskipun terkendala oleh pandemic covid 19 yang berlangsung sejak 2021.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan sektor perdagangan, perindustrian serta koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sikka.

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>iv</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Dasar Hukum</i>	1
1.2. <i>Gambaran Umum Dinas</i>	1
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH	2
2.1 <i>Realisasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Dinas PKUKM</i>	2
2.2 <i>Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah</i>	8
BAB III PENUTUP	18
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
<i>Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan Capaian Kinerja DPKUKM</i>	2
<i>Tabel 2.2 Realisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan</i>	3
<i>Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pilihan Bidang Industri</i>	7
<i>Tabel 2.2.2 Indikator Kunci Urusan Pilihan Bidang Perdagangan</i>	9
<i>Tabel 2.2.3 Indikator Kunci Pilihan Bidang Koperasi, UKM</i>	12

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016.

1.2 Gambaran Umum Dinas

*Secara umum Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun 2021 ada 2 (dua) urusan pilihan perdagangan dan urusan pilihan perindustrian, dan 1 (satu) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam urusan pilihan perdagangan melaksanakan 5 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi belanja langsung Rp.2.016.918.800. Untuk urusan perindustrian terdapat 1(satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan alokasi belanja langsung Rp.558.656.300; sedangkan untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar koperasi terdapat 6 (enam) program 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan dengan alokasi belanja langsung Rp. 6.248.772.170. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka memiliki **alokasi belanja langsung Rp. 3.569.342.841 dan belanja tidak langsung sejumlah Rp. 4.526.998.129 sehingga jumlah total keseluruhan alokasi anggaran dalam Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 8.265.690.970***

Dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan kegiatan Pelatihan dan Pengurus Manajemen Pengelolaan Koperasi dan KUD sejumlah Rp.453.012.800,- yang bersumber dari DAK Kementerian Koperasu dan UKM Republik Indonesia, untuk kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD dan Kewirausahaan UKM bagi Pengurus, pengawas dan pengelola sejumlah Rp.453.012.800;

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

2.1 REALISASI PELAKSANAAN CAPAIAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Dalam menyusun rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan target kinerja dalam perjanjian kinerja sehingga pencapaian tujuan dan sasarannya tepat. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya aktivitas perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	16,59	10,4
		Jumlah Barang Masuk dan Keluar	Ton	984.758	319.348
		Jumlah Sarana Perdagangan	Unit	85	1
		Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha yang dibina	Orang	7.366	0
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1,74	1,74
		Jumlah Produktifitas Sektor Industri	IKM	720	5.491
3	Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri	Persentase Binaan Kelompok Industri Rumah Tangga	%	36,56	11,28
4	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	%	6,94	39,22
		Persentase Koperasi Aktif	%	75,53	68,85
5	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha	Persentase Jumlah UKM yang diberdayakan	%	3,6	39,22
		Persentase Wirausaha Terlatih	%	0,090	0,030
		Persentase Pelaku Usaha yang diberdayakan	%	3,42	0,023
6	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kerja	%	68,57	82,37

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan, bahwa Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sikka tidak mengalami Signifikan yang mempengaruhi Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sikka.

Realisasi pelaksanaan perencanaan dapat kita lihat pada penjabaran program/kegiatan dan pada Evaluasi Renja tahun 2021, yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sikka sebagai berikut :

Tabel : 2.2

NO	Sasaran	Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi %
1.	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPKUKM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPKUKM	16.628.800	16.628.800	100
2.	Kantor Dinas dan 3 Pasar	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang dibutuhkan	4.801.893	4.801.893	100
3.	sda	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana Pendukung Pelaksanaan Administrasi Kantor	27.967.600	27.967.600	100
4.	sda	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Tamu yang tersedia	9.270.000	9.270.000	100
5.	sda	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan/ dokumen Kantor yang digandakan	8.975.700	8.975.700	100
6.	Kantor Dinas PKUKM	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar Pos Kupang yang tersedia	840.000	840.000	100
7.	Kantor Dinas dan 3 Pasar	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN Pengadaan Mesin Absensi, Mesin Potong Rumput, CCTV	33.811.100	33.700.000	99,67
8.	Kantor Dinas dan 3 Pasar	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim selama satu Tahun	0	0	0
9.	Kantor Dinas dan 3 Pasar	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telpon, Air dan Listrik	115.402.236	114.808.236	99,49
10	sda	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Komputer dan Printer yang tersedia	29.925.000	29.925.000	100
11.	sda	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum dan Jasa Administrasi	1.677.033.900	1.668.108.780	99,47

			<i>Keuangan DPKUKM</i>			
12.	<i>Kantor Dinas PKUKM</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara</i>	<i>72.360.000</i>	<i>71.994.610</i>	<i>99,50</i>
13.	<i>Kantor Dinas dan 3 Pasar</i>	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan/ Jumlah Gedung yang di Rehab</i>	<i>3.886500</i>	<i>3.882.200</i>	<i>83,35</i>
14.	<i>37 Koperasi</i>	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya KSP/USP yang difasilitasi</i>	<i>2.663.800</i>	<i>2.663.800</i>	<i>100</i>
15.	<i>80 Koperasi</i>	<i>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi</i>	<i>29.875.000</i>	<i>29.887.500</i>	<i>100</i>
16.	<i>40 Koperasi</i>	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Koperasi Sehat</i>	<i>15.200.000</i>	<i>15.200.000</i>	<i>100</i>
17.	<i>9 Koperasi</i>	<i>Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Koperasi Sehat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	<i>20 Koperasi</i>	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkopersaian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Meningkatnya Jumlah Pengurus dan Pemahaman Perkoperasian</i>	<i>453.012.800</i>	<i>451.777.742</i>	<i>99,73</i>
19.	<i>20 Peserta</i>	<i>Fasilitasi Usa Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam</i>	<i>Meningkatnya Jumlah Produksi UMKM dan SDM</i>	<i>177.785.000</i>	<i>176.785.000</i>	<i>99,44</i>

		<i>Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain Teknologi</i>	<i>Berbasis Teknologi</i>			
20.	5 Rekomendasi	<i>Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan Atau pun Toko Swalayan yang memperoleh Ijin</i>	28.850.000	28.850.000	100
21.	2 Pasar	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Meningkatnya Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>	37.476.100	37.476.100	100
22	2 Pasar	<i>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Meningkatnya Meningkatkan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>	1.227.175.000	1.227.048.000	99,99
23.	3 Pasar	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>	<i>Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat agen dan Pasar Rakyat</i>	43.950.000	43.950.000	100
24.	48 Kali	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	19.660.000	19.660.000	100
25.	8 Kali	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Operasi Khusus</i>	19.926.400	19.725.000	98,74
26.	2 Kali	<i>Pembinaan dan Pengembangan Usha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Usaha</i>	0	0	0
27.	1 Kali	<i>Pengawasan/ Penyuluhan Meterologi Lega</i>	<i>Terjaminnya Pasar Tertib Ukur</i>	59.362.240	48.862.000	82,31
28	100%	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri</i>	<i>Berkembangnya IKM Pengelola Komoditi Unggulan</i>	179.535.900	179.205.000	99,82
29	100%	<i>Kegiatan</i>	<i>Meningkatnya</i>	379.120.400	370.758.240	97,79

		<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	<i>Sarana dan Prasarana di 3 Centra 1 Klinik Kemasan Industri Pengolahan</i>			
--	--	--	--	--	--	--

*Dari tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa realisasi rencana program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sikka sebesar **98,00%**.*

2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pilihan Bidang Industri dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 2.2.1

NO		IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	BOBOT	KETERANGAN
I	1	Persentase jumlah penempatan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Petambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n \text{ Jumlah industri kecil dan menengah tahun } (n-1)}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$		TIDAK ADA
2	2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan PERDA	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP		
3	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Persentase jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Insustri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang	<p>Jumlah Izin yang di Pantau dan dianalisis dalam Laporan Hasil Pemantauan</p> $\frac{\text{Jumlah Izin yang Dikeluarkan}}{\text{Jumlah Izin yang Dikeluarkan}} \times 100\%$ <p>$\frac{5.491}{251} \times 100\%$</p>	21,9%	Banyaknya Usaha Industri yang belum memiliki Izin

			<i>dikeluarkan oleh Instansi Terkait</i>			
	2	<i>Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan</i>				<i>Sejak berlakunya Sistem OSS yaitu Pengurusan Izin secara Online maka mulai dari Tahun 2019 tidak ada lagi yang mengurus Izin secara Manual</i>

Dari Tabel Indikator Kinerja Kunci diatas dapat kita lihat ada 3 (tiga) Bagian Bobot yang tidak dapat dihitung dikarenakan berlakunya Pengurusan Ijin secara Online dan Kewenangan tidak ada pada Dinas Perdagangan, koperasi dan UKM Kab. Sikka.

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 2.2.2

NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	BOBOT	KETERANGAN
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai dengan Ketentuan			
	a. Pusat Perbelanjaan	= 100%	$\frac{\text{Jumlah yang Belum Memiliki Izin}}{\text{Jumlah Keseluruhan}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100\%$	1	Data Terlampir
	b. Toko Swalayan		$\frac{21}{22} \times 100\%$	94,4%	Data Terlampir
2	Persentase penerbitan TDG	Terlaksananya a Penertiban TDG	$\frac{\text{Jumlah Penertibah TDG}}{\text{Jumlah TDG}} \times 100$ $\frac{22}{24} \times 100\%$	100%	Data Terlampir
3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Penertiban Gudang yang tidak memiliki TDG (ada 7 gudang)	$\frac{\text{Jumlah Gudang yang Tidak Memiliki TDG}}{\text{Jumlah Gudang yang Memiliki TDG}} \times 100$ $\frac{7}{31} \times 100$	22,5%	Data Terlampir
I	4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :			Tidak ada data dikarenakan belum ada yang mengurus
	5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan			Tidak Memiliki Fasilitasnya sehingga tidak dapat hitung

		berbahaya di tingkat daerah Kab/ Kota				
	6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu				Pengurusan Secara Online Langsung di Kementerian
	7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Terlaksananya a Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kab. Sikka	$\frac{\text{Jumlah Pengembangan Pengelolaan Sarana Perdagangan}}{\text{Jumlah Pengelola Sarana Perdagangan}} \times 100$ $\frac{1}{1}$	1	Dokumen Terlampir
	8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Tercapainya Persentase Koefisien Variasi Harga antara Waktu	$\frac{\text{Jumlah Volume Perdagangan Tahun } n - \text{Jumlah Volume Perdagangan}}{\text{Jumlah Volume perdagangan Tahun } n} \times 100\%$ $\frac{319.348 - 260.913}{319.348} \times 100\%$		
2	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja Realisasi Pupuk	$\frac{\text{Jumlah Pupuk}}{\text{Jumlah Kelompok Tani}} \times 100$ $\frac{880}{2050} \times 100\%$	0,42%	Dokumen Terlampir
3	1	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Tercapainya Alat UTTP yang sudah Bertanda Tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera ulang di wilayah kabupaten / kota}} \times 100 \%$ $\frac{725}{3480} \times 100\%$	20,83 %	Dokumen Terlampir
	2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap	Tercapainya Pengawasan BDKT	$\frac{195}{4259} \times 100\%$	4,5%	Dokumen Terlampir

		<i>ketentuan yang berlaku</i>				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Dari Tabel Indikator Kinerja Kunci diatas dapat kita lihat ada 3 (tiga) Bagian Bobot yang tidak dapat dihitung dikarenakan belum ada yang mengurus, belum adanya Fasilitas dan berlakunya Pengurusan Ijin secara Online dan Kewenangan tidak ada pada Dinas Perdagangan, koperasi dan UKM Kab. Sikka.

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pilihan Bidang Kopersai, Usaha Kecil dan Menengah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 2.2.3

NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	BOBOT	KETERANGAN
-----------	-------------------	------------------------	--------------	--------------	-------------------

1	Presentase fasilitas penertiban ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				Dinas PKUKM hanya mempunyai Wewenang mengeluarkan Rekomendasi Sedangkan Ijin tidak
2	Presentase fasilitas penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusahan simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				Dinas PKUKM hanya mempunyai Wewenang mengeluarkan Rekomendasi Sedangkan Ijin tidak
3	Presentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	$\frac{\text{Jumlah Ksp/Usp di Periksa dan di Awasi}}{\text{Jumlah Sasaran}} \times 100$ $\frac{65}{80} \times 100\%$	81,25%	Data Terlampir
4	Presentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai	Jumlah KSP/USP yang di Nilai	$\frac{\text{Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan}}{\text{Jumah Sasaran}} \times 100\%$		Data Terlampir

		kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{39}{40} \times 100\%$	97,50%	
	5	Presentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Jumlah SDM Koperasi yang Paham Tentang Perkoperasian	$\frac{\text{Jumlah yang mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$ $\frac{40}{183} \times 100\%$	21,85%	Data Terlapir
I	6	Presentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Jumlah Anggota Koperasi yang Paham Tentang Perkoperasian	$\frac{\text{Anggota yang Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah Anggota}} \times 100\%$ $\frac{155}{435.710} \times 100\%$	0,03%	Data Terlapir
	7	Presentase yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang telah menyelenggarakan diklat Perkoperasian	$\frac{\text{Koperasi yang Telah Menyelenggarakan Diklat}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$ $\frac{9}{183} \times 100\%$	4,91%	Data Terlapir
	8	Presentase koperasi yang	Meningkatnya Jumlah	$\frac{\text{Koperasi yang mendapat dukungan}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$		Data Terlapir

		<i>diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</i>	<i>Koperasi yang mendapat dukungan Fasilitas Pembiayaan</i>	$\frac{1}{183} \times 100\%$	54,64%	
9		<i>Presentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>				<i>Tidak Mempunyai Kewenangan Mengurus Ijin hanya dapat Mengeluarkan Rekomendasi</i>
10		<i>Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	<i>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha</i>			<i>Tidak dapat di terbitkan karena banyak Koperasi yang adalah Koperasi Simpan Pinjam</i>
11		<i>Presentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah</i>				<i>Tidak Terlaksana dikarenakan tidak ada Anggaran</i>

		<i>kabupaten/kota</i>				
	12	<i>Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	<i>Terlaksananya Pendampingan Koperasi</i>	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan Dukungan}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100$ $\frac{65}{80} \times 100\%$	81,25%	<i>Data Terlampir</i>
	13	<i>Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>				<i>Tidak Terlaksana dikarenakan tidak ada Anggaran</i>
	1	<i>Rasio pertumbuhan dan wirausaha baru yang berskala mikro</i>	<i>Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha</i>	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha yang Baru}}{\text{Jumlah Wira Usaha}} \times 100$ $\frac{6.282}{25.754} \times 100\%$	24,39%	<i>Data Terlampir</i>
	2	<i>Presentase jumlah usaha yang diinput ke dalam sistem online data system(ODS)</i>	<i>Meningkatnya Jumlah Usaha yang sudah Masuk dalam Data ODS</i>	$\frac{\text{Jumlah Usaha yang di Input}}{\text{Jumlah Usaha}} \times 100$ $\frac{1.589}{6.282} \times 100\%$	25,29%	<i>Data Terlampir</i>
2	3	<i>Presentase jumlah mikro</i>	<i>Meningkatnya Jumlah</i>	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro}}{\text{Jumlah Mikro yang Bermitra}} \times 100$		<i>Data Terlampir</i>

		yang bermitra	Mikro yang bermitra	$\frac{150}{25.754} \times 100\%$	0,58%	
4	Presentase jumlah mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Meningkatnya Jumlah Mikro yang sudah Sertifikasi	$\frac{349}{1.276} \times 100\%$	- $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Bersertifikasi}} \times 100$	27,35%	Data Terlampir
5	Presentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas Pemasaran	$\frac{72}{25.754} \times 100\%$	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitas Pemasaran}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Medapat Fasilitas pemasaran}} \times 100$	0,25%	Data Terlampir
6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang dilatih	$\frac{155}{25.754} \times 100\%$	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang dilatih}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100$	0,6%	Data Terlampir
7	Presentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pendampingan	$\frac{72}{25.754} \times 100\%$	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang dilatih}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100$	0,027%	Data Terlampir

Dari Tabel Indikator Kinerja Kunci diatas dapat kita lihat ada 6 (enam) Bagian Bobot yang tidak dapat dihitung dikarenakan tidak adanya Anggaran dan DPKUKM tidak Berkewenangan Mengeluarkan Ijin hanya Berkewenangan Mengeluarkan Rekomendasi.

BAB III

PENUTUP

*Dalam keterbatasan, Dinas berusaha secara maksimal melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun 2021 dengan baik dengan tingkat capaian sebesar **98,00%** dari capaian target yang ditentukan yaitu 100% dan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada masing-masing Tabel diatas. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka secara maksimal melakukan pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa, pembinaan dan perbaikan manajemen pengelolaan pasar, pengawasan peredaran barang masuk dan keluar, memfasilitasi pemberian bahan baku/bahan penolong produksi bagi Industri tekstil yaitu kelompok-kelompok tenun ikat, memfasilitasi pemberian bantuan peralatan produksi bagi kelompok,*

mempromosikan produk kain tenun ikat dari kelompok-kelompok tenun ikat di Galeri Industri Kreatif Nian Sikka serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses produksi kain tenun ikat melalui operasional sentra tenun ikat jata kapa. Selain itu, Koperasi maupun pelaku Usaha Kecil dan Menengah juga terfasilitasi melalui pemberian bantuan modal usaha serta pelatihan pengelolaan manajemen koperasi.

Sebagai akhir dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021, sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara/ASN yang kreatif dan inovatif sangatlah diperlukan dalam menjalankan tugas khususnya ketika menghadapi kendala pandemi penyebaran virus corona/Covid 19. Karena itu, pelatihan, bimbingan teknis serta pengadaan sarana dan prasarana kerja yang memadai merupakan metode yang strategis untuk menyikapi kondisi tersebut. Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka turut memegang peranan sebagai sektor pendukung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan PDRB Kabupaten Sikka baik dari sektor perdagangan maupun sektor perindustrian sesuai perencanaan strategis Kabupaten Sikka. (Seluruh Data Terlampir)

*Maumere, 20 Januari 2022
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Sikka*

YOSEF BENYAMIN, SH
*Pembina Tk.I
NIP. 19690728 199903 1 006*